**Petunjuk Pelaksanaan Tentang**

**Tata Cara Harmonisasi**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

**Terhadap**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

**Tahun 2015-2019**

## DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| I | Pendahuluan | 1 |
| II | Tujuan dan Sasaran | 2 |
| III | Landasan Hukum | 2 |
| IV | Ketentuan Umum | 2 |
| V | Tahapan Pelaksanaan Harmonisasi | 4 |
| VI | Ruang Lingkup Harmonisasi | 5 |
| VII | Instrumen Harmonisasi | 6 |
| VIII | Penutup | 6 |
| | Lampiran | 7 |

## I. Penduhuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat sasaran pokok pembangunan nasional beserta serangkaian kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun haruslah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah jangka menengahnya yang tertuang dalam RPJM Daerah. sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional salah satunya adalah "mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan" dan "menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah" (Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pun dijelaskan bahwa RPJM Daerah haruslah berpedoman pada RPJM Nasional (Pasal 263 UU No. 23 Tahun 2014).

Untuk menjaga harmonisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 20104 diatas. Pemerintah menjelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah (Pasal 17 PP No. 40 Tahun 2006). Oleh karena itu, di dalam dalam mekanisme penyusunan RPJMN 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, terdapat mekanisme *Bilateral Meeting*, yaitu pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat - yang dalam hal ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah.

Namun demikian, walaupun sudah banyak peraturan yang menjelaskan perihal keharusan adanya kekterpaduan dan sinkronisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah, belum ada panduan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Pusat, terutama kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RPJM Nasional dan RPJM Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman pelaksanaan harmonisasi antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan penyusunan RPJM Nasional tahun 2015-2019.



## II. Tujuan dan Sasaran

Pedoman Pelaksanaan Harmonisasi RPJMN Tahun 2014-2019 terhadap RPJM Daerah ini disusun sebagai alat bantu bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan harmonisasi RPJMD terhadap RPJMN tahun 2015-2019 serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah;
2. Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2015-2019;
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMN tahun 2015-2019 dengan kebijakan di dalam RPJM Daerah;
4. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMN tahun 2015-2019 ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## III. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

## IV. Ketentuan Umum

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional merupakan tujuan akhir (*goals*) yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
13. Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan.
14. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu



program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

17. Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan tetap mempehatikan regulasi yang berlaku.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## V. Tahapan Pelaksanaan Harmonisasi

Tahapan Pelaksanaan harmonisasi RPJM Nasional dan RPJM Daerah secara garis besar, digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Harmonisasi RPJMN 2015-2019 dan RPJM Daerah

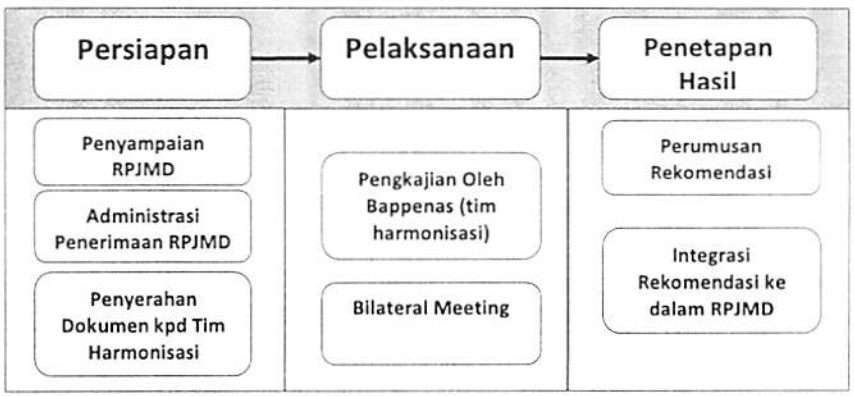


1. Tahap Persiapan dilakukan oleh Bappenas dan Bappeda. Dalam hal ini Bappeda menyampaikan dokumen RPJMD kepada Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah (EKPD) Bappenas untuk kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Harmonisasi.

2. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan diawali oleh penelaahan dokumen RPJM Daerah oleh Bappenas (Tim Harmonisasi) dan kemudian hasilnya dibawa ke Bilateral Meeting dengan Bappeda.
3. Tahap Penetapan Hasil dilakukan untuk merumuskan hasil Bilateral Meeting ke dalam rekomendasi perbaikan RPJM Daerah yang harus dilakukan.

## VI. Ruang Lingkup Harmonisasi

Sesuai dengan tujuan dan maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan Harmonisasi RPJMN dan RPJMD ini, maka ruang lingkup harmonisasi yang perlu dilakukan antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional;
2. Kesesuaian Strategi Pembangunan Daerah dengan Tema Pengembangan Wilayah;
3. Kesesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pengembangan Wilayah;

**1. Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional;**

Pensinergian antara tujuan dan sasaran RPJM Daerah dilakukan dengan menelaah substansi dari tujuan dan sasaran RPJM Daerah serta menilai daya dukung tujuan dan sasaran RPJM Daerah terhadap pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasinoal 2015-2019. Pada tahap ini, Kementerian PPN/Bappenas menjabarkan masing-masing sasaran di dalam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ke dalam kontribusi masing-masing daerah.

**2. Kesesuaian Strategi Pembangunan Daerah dengan Tema Pengembangan Wilayah;**

Penilaian Kesesuaian strategi pembangunan daerah dengan tema pengembangan wilayah dilakukan dengan menelaah strategi pembangunan daerah di dalam RPJMD dengan tema pengembangan wilayah yang terdapat di dalam Buku III RPJMN 2015-2019.



**3. Kesesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pengembangan Wilayah;**

Penilaian kesesuaian antara arah kebijakan pembangunan daerah terhadap tujuan pengembangan wilayah dilakukan dengan menelaah arah kebijakan pembangunan daerah di dalam RPJMD terhadap tujuan pengembangan wilayah yang terdapat di dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

## VII. Instrumen Harmonisasi

Instrumen Harmonisasi merupakan alat bantu yang digunakan oleh Tim Harmonisasi dalam pelaksanaan pengkajian harmonisasi RPJM Nasional dan RPJM Daerah.Instrumen Harmonisasi disusun berdasarkan ruang lingkup harmonisasi. Instrumen Harmonisasi dapat dilihat pada Lampiran Pedoman ini.

## VIII. Penutup

Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan pembangunan jangka menengah di Pusat dan Daerah terkait dengan disusunnya RPJMN tahun 2015-2019. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga pedoman ini disusun. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perbaikan RPJM Daerah yang telah ada untuk dapat menyelaraskan dengan RPJMN tahun 2015-2019. Segala masukan dan pertanyaan atas pedoman ini dapat disampaikan kepada Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

## Lampiran I

## Pedoman Pelaksanaan Harmonisasi RPJM Nasional dan RPJM Daerah.

### Instrumen Harmonisasi RPJM Nasional dan RPJM Daerah

1. Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional;

   Pada bagian ini, Tim Harmonisasi melakukan penilaian kesesuaian antara Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD serta menjabarkan target-target Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ke dalam kontribusi daerah dalam pencapaian target tersebut.

   Berikut ini adalah intrumen pengkajian sinergi Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional.

Tabel I.

Penilaian Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang telah memiliki target per provinsi per tahun

| Indikator | Target di dalam RPJMD | Target di dalam RPJMN |
|---|---|---|
| **Indikator Makro** | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | | |
| Tingkat Pengangguran | | |
| Tingkat Kemiskinan | | |

Tabel II.

Penilaian Sinergi Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Sasaran Pokok Pembangunan Nasional



| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Sasaran Makro** | | | | | |
| **Pembangunan Manusia dan Masyarakat** | | | | | |
| 1) | Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
| 2) | Indeks Pembangunan Masyarakat[1] | | | | |
| 3) | Indeks Gini | | | | |
| 4) | Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | | | | |
| 5) | Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan | | | | |
| | - Pekerja Formal | | | | |
| | - Pekerja Informal | | | | |
| **Ekonomi Makro** | | | | | |
| 6) | Pertumbuhan Ekonomi | | | | |
| | PDRB per Kapita (tahun dasar 2010) | | | | |
| | PDRB per Kapita (tahun dasar 2000) | | | | |
| 7) | Inflasi | | | | |
| 8) | Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 | | | | |
| 9) | Tingkat Kemiskinan | | | | |
| 10) | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | | | | |
| **II. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat** | | | | | |
| **Kependudukan dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| 11) | Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk | | | | |
| 12) | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) | | | | |
| 13) | Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods) | | | | |
| **Pendidikan** | | | | | |

[1] *Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat*

| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14) | Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun | | | | |
| 15) | Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun | | | | |
| 16) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | | | | |
| 17) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | | | | |
| 18) | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B | | | | |
| 19) | Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B | | | | |
| 20) | Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya | | | | |
| 21) | Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya | | | | |
| **Kesehatan** | | | | | |
| **1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat** | | | | | |
| 22) | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran | | | | |
| 23) | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | | | | |
| 24) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) | | | | |
| 25) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) | | | | |
| **2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** | | | | | |
| 26) | Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk | | | | |
| 27) | Prevalensi HIV (persen) | | | | |
| 28) | Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) | | | | |
| 29) | Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) | | | | |



| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30) | Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun | | | | |
| **3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan** | | | | | |
| 31) | Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi | | | | |
| 32) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi | | | | |
| 33) | Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan | | | | |
| **Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | |
| 34) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | | |
| 35) | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | | | |
| **Perlindungan Anak** | | | | | |
| 36) | Prevalensi Kekerasan terhadap Anak | | | | |
| **Pembangunan Masyarakat** | | | | | |
| 37) | Indeks gotong royong[2] | | | | |
| 38) | Indeks toleransi[3] | | | | |
| 39) | Indeks rasa aman[4] | | | | |
| 40) | Jumlah konflik sosial (per tahun) | | | | |
| 41) | Nilai Tukar Petani | | | | |
| 42) | Nilai Tukar Nelayan | | | | |
| **III. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan** | | | | | |
| **Kedaulatan Pangan** | | | | | |
| 43) | Produksi Komoditas Pangan | | | | |
| a) | Padi (Juta Ton) | | | | |
| b) | Jagung (Juta Ton) | | | | |
| c) | Kedelai (Juta Ton) | | | | |

[2] mengukur keperca-yaan kepada lingkungan tempat tinggal, ke-mudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial

[3] mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal

[4] mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal

| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| d) | Gula (Juta Ton) | | | | |
| e) | Daging Sapi (Ribu Ton) | | | | |
| f) | Produksi perikanan (juta ton) | | | | |
| 44) | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi | | | | |
| a) | Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) | | | | |
| b) | Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) | | | | |
| c) | Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) | | | | |
| d) | Pembangunan waduk | | | | |
| **Maritim dan Kelautan** | | | | | |
| **1. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar** | | | | | |
| 45) | Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan | | | | |
| **2. membangunan Konektivitas Nasional** | | | | | |
| 46) | Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut | | | | |
| 47) | Pengembangan pelabuhan penyeberangan | | | | |
| **3. pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan** | | | | | |
| 48) | Produksi hasil perikanan (juta ton ) | | | | |
| 49) | Pengembangan pelabuhan perikanan | | | | |
| 50) | Peningkatan luas kawasan konservasi laut | | | | |
| **Pariwisata dan Industri Manufaktur** | | | | | |
| **1. Pariwisata** | | | | | |
| 51) | Wisatawan Mancanegara (Orang) | | | | |
| 52) | Wisatawan Nusantara (Kunjungan) | | | | |
| 53) | Devisa (triliun rupiah) | | | | |
| **2. Industri Manufaktur** | | | | | |
| 54) | Pertumbuhan sektor Industri | | | | |
| 55) | Penambahan jumlah Industri | | | | |



| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| | skala menengah dan besar (kumulatif hingga akhir tahun) | | | | |
| **Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas** | | | | | |
| **1. Ketahanan Air** | | | | | |
| 56) | Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH | | | | |
| 57) | Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas[5] dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019 | | | | |
| 58) | Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air | | | | |
| 59) | Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) | | | | |
| 60) | Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir | | | | |
| **2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas** | | | | | |
| 61) | Kapasitas Pembangkit (GW) | | | | |
| 62) | Rasio elektrifikasi | | | | |
| 63) | Konsumsi Listrik Perkapita | | | | |
| 64) | Kawasan permukiman kumuh perkotaan | | | | |
| 65) | Kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni | | | | |
| 66) | Akses Air Minum Layak | | | | |
| 67) | Akses Sanitasi Layak | | | | |
| 68) | Kondisi mantap jalan Kabupaten/Provinsi | | | | |
| 69) | Pengembangan jalan Kabupaten/Provinsi | | | | |
| 70) | Pembangunan jalan baru * | | | | |

[5] DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas

| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71) | panjang jalur kereta api | | | | |
| 72) | Pengembangan pelabuhan | | | | |
| 73) | Dwelling Time Pelabuhan | | | | |
| 74) | Jumlah bandara | | | | |
| 75) | On-time Performance penerbangan | | | | |
| 76) | Kab/Kota yang dijangkau Broadband | | | | |
| 77) | Jumlah Dermaga Penyeberangan | | | | |
| 78) | Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan | | | | |
| **3. Lingkungan** | | | | | |
| 79) | Emisi Gas Rumah Kaca | | | | |
| 80) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | | | |
| 81) | Tambahan Rehabilitasi Hutan | | | | |
| **IV. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan** | | | | | |
| **Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi** | | | | | |
| 82) | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
| 83) | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | |
| **Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses Terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu** | | | | | |
| **1. Cakupan pada 40% penduduk miskin** | | | | | |
| 84) | Kepesertaan Jaminan Kesehatan | | | | |
| 85) | Akses Pangan Bernutrisi | | | | |
| 86) | Akses Terhadap Layanan Keuangan | | | | |
| **2. pelayanan Dasar Bagi penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)** | | | | | |
| 87) | Kepemilikan akte lahir (2013) | | | | |
| 88) | Akses air bersih | | | | |
| 89) | Akses sanitasi layak | | | | |



| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90) | Akses penerangan | | | | |
| **3. Peningakatan Daya Saing Tenaga Kerja** | | | | | |
| 91) | Penyediaan lapangan kerja (2015-2019) | | | | |
| 92) | Persentase tenaga kerja formal | | | | |
| **4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan** | | | | | |
| a) | Pekerja formal | | | | |
| b) | Pekerja Informal | | | | |
| **5. Meningkatkan Kualitas dan Keterampilan Pekerja** | | | | | |
| 93) | Jumlah pelatihan pekerja | | | | |
| 94) | Jumlah sertifikas pekerjai | | | | |
| 95) | Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten | | | | |
| 96) | Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi | | | | |
| **V. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah** | | | | | |
| **Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah** | | | | | |
| **1. Pembangunan Desa Tertinggal** | | | | | |
| 97) | Penurutan desa tertinggal | | | | |
| 98) | Peningkatan Desa | | | | |
| **2. Pembangunan Daerah Tertinggal** | | | | | |
| 99) | Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) | | | | |
| 100) | Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan | | | | |
| 101) | Jumlah Daerah Tertinggal | | | | |
| 102) | Kabupaten terentaskan | | | | |
| 103) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | | | | |
| 104) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | | | | |
| 105) | Indeks Pembangunan | | | | |

| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manuasia (IPM) di daerah tertinggal | | | | |
| **3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa** | | | | | |
| 106) | Untuk daerah di luar Jawa | | | | |
| 107) | Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa | | | | |
| 108) | Kawasan Industri | | | | |
| 109) | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) | | | | |
| **VI. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan** | | | | | |
| **Politik dan Demokrasi** | | | | | |
| 110) | Tingkat Partisipasi Politik Pemilu | | | | |
| 111) | Indeks Demokrasi Daerah | | | | |
| **Penegakan Hukum** | | | | | |
| 112) | Penegakan Hukum | | | | |
| 113) | Persepsi Korupsi (IPK) | | | | |
| 114) | Perilaku Anti Korupsi | | | | |
| 115) | Integritas Pelayanan Publik (Daerah) | | | | |
| 116) | Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B) | | | | |
| 117) | Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B) | | | | |
| **Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah** | | | | | |
| **1. Kinerja Keuangan Daerah** | | | | | |
| 118) | presentase belanja pegawai Kab/Kota | | | | |
| 119) | persentase pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan | | | | |
| 120) | persentase pajak retribusi | | | | |



| Apakah di dalam Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah telah termuat sasaran-sasaran sebagai berikut? | | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prov terhadap total pendapatan | | | | |
| 121) | persentase belanja modal Kab/Kota | | | | |
| 122) | persentase belanja modal Prov | | | | |
| 123) | presentase belanja pegawai Kab/Kota | | | | |
| 124) | presentase belanja pegawai Prov | | | | |
| 125) | persentase ketergantungan dana transfer Kab/Kota | | | | |
| 126) | persentase ketergantungan dana transfer Provinsi | | | | |
| **2. Kinerja Kelembagaan** | | | | | |
| 127) | PTSP Kondisi Mantap | | | | |
| 128) | Perda bermasalah | | | | |
| 129) | Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru[6] | | | | |
| | Rata-rata kinerja maksimal | | | | |
| | Rata-rata kinerja minimal | | | | |
| 130) | Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41)[7] | | | | |
| 131) | Penerapan SPM | | | | |
| **3. Kinerja Aparatur** | | | | | |
| 132) | Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 | | | | |
| **Pertahanan dan Keamanan** | | | | | |
| 133) | Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba | | | | |

[6] Bagi DOB
[7] Berlaku pada 299 daerah sampel

2. Kesesuaian Strategi Pembangunan Daerah dengan Tema Pengembangan Wilayah;

Penilaian Kesesuaian strategi pembangunan daerah dengan tema pengembangan wilayah dilakukan dengan menelaah strategi pembangunan daerah di dalam RPJMD dengan tema pengembangan wilayah yang terdapat di dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

Tabel III.

Kesesuaian Strategi Pembangunan Daerah dengan Tema Pengembangan Wilayah

| Wilayah | Tema Pengembangan | Strategi Pembangunan Daerah |
|---|---|---|
| Papua | • Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;<br>• Dst ... | |
| Maluku | • Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional<br>• Dst ... | |
| dst... | | |



3. Kesesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pengembangan Wilayah;

Penilaian kesesuaian antara arah kebijakan pembangunan daerah terhadap tujuan pengembangan wilayah dilakukan dengan menelaah arah kebijakan pembangunan daerah di dalam RPJMD terhadap tujuan pengembangan wilayah yang terdapat di dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

Tabel IV.

Kesesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pengembangan Wilayah

| Wilayah | Tujuan Pengembangan | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah |
|---|---|---|
| Nusa Tenggara | a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga;<br>b. penyediaan infrastruktur wilayah;<br>c. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. | |
| Sulawesi | a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari;<br>b. penyediaan infrastruktur wilayah; | |

| | | |
|---|---|---|
| | c. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. | |
| Sumatera | a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;<br>b. Dst... | |
| Dst... | | |